Pontianak Post • Rabu 23 Februari 2011

Tiga Kabupaten Belum Serahkan Informasi LKPj

PONTIANAK - Tiga kabupaten di Kalimantan Barat belum menyampaikan informasi rencana penyelesaian laporan keuangannya, yakni Bengkayang, Sanggau, dan Landak. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo, berharap informasi tersebut segera disampaikan.

"Kami juga mengimbau semua pemerintah daerah selalu meningkatkan capaian opini hasil pemeriksaan," kata Adi dalam Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, Selasa (22/2) di Hotel Mercure Pontianak.

Adi mengungkapkan pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2010 akan dilaksanakan segera pada

• ke halaman 15 kolom 1

Tiga Kabupaten Belum SerahkanInformasi LKPj

Sambungan dari halaman 9

minggu kedua Maret 2011. Pemeriksaan ini dilakukan dua tahap.

Tahap pertama diprioritaskan kepada 10 entitas yang telah menyelesaikan laporan keuangan sesuai jadwal. Pemeriksaan diharapkan selesai pada akhir April. Tahap kedua dilaksanakan pada lima entitas dan diharapkan selesai pertengahan Juni 2011.

"Saat ini tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI masih rendah," katanya.

Dari 2004 sampai semester 2 pada 2010, BPK telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap 15 entitas yang ada di Kalbar. Hasilnya, terdapat 2.144 temuan dan 4.313 rekomendasi. Dari jumlah rekomendasi yang dikeluarkan, 47 persen telah sesuai tindak lanjut, 30 persen belum sesuai tindak lanjut, dan 23 persen belum ditindaklanjuti.

Gubernur Kalbar, Cornelis meminta seluruh kepala daerah mempertanggungjawabkan keuangan yang dikucurkan pemerintah pusat maupun anggaran pendapatan belanja daerah. Ia juga meminta Inspektorat melakukan pengawasan. "Inspektorat harus berani menegur," katanya.

Untuk menindaklanjuti Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, Pemprov Kalbar telah membentuk Tim TL LHP BPK. Tim ini berjalan dengan baik dan secara kontinu mengadakan pertemuan dengan tim legislatif DPRD Kalbar. Ini dilakukan untuk menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian terhadap rekomendasi LHP BPK yang telah dilakukan.

Tim memiliki tanggungjawab cukup berat dalam mendorong dan memfasilitasi pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk segera menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

"Saya menegaskan kembali bahwa laporan keuangan provinsi maupun kabupaten/kota se Kalbar yang telah memperoleh predikat wajar dengan pengecualian pada 2009, harus ditingkatkan menjadi wajar tanpa pengecualian. Minimal dipertahankan," ungkapnya.

Khusus jajaran Pemprov Kalbar, kabupaten, dan kota harus segera menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemda tepat waktu. "Karena sebelum diserahkan kepada BPK RI lebih dulu akan dilakukan review oleh Inspektoratnya," katanya. ***(uni)***